

# **Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo**

**Hendra Maujana Saragih**  
Universitas Nasional, Jakarta  
hendramaujana@gmail.com

## **Abstract**

*This paper trying to explain the serious efforts and sympathy of the Government and Indonesian people with the Palestinian struggle colonized by Israel and Indonesia's foreign policy in supporting Palestine as an independent State. The main problem of this study is what steps have been taken by the Indonesian Government in an effort to support Palestine in order to be free and become a sovereign country like other countries? This study uses a qualitative research method by describing the social phenomena of the Palestinian struggle and the support provided by Indonesia even by moral and material forms. The findings of this study prove that Indonesia has really been focused on helping Palestine with the focus that the Palestinian conflict is a humanitarian conflict and can be used as a role model for other Islamic countries in supporting Palestine in order to be equal to other nations in the World.*

**Keywords:** Foreign Policy; Independence; Struggle; Diplomacy

## **Abstrak**

*Tulisan ini berupaya memaparkan upaya serius dan simpati pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan perjuangan Palestina yang dijajah oleh Israel serta kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Adapun pokok masalah kajian ini adalah langkah apa saja yang diambil Pemerintah Indonesia dalam upaya mendukung Palestina agar bisa bebas merdeka dan menjadi negara yang berdaulat seperti negara lain? Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan fenomena sosial perjuangan Palestina serta dukungan yang diberikan Indonesia baik dalam bentuk moril maupun materi. Temuan kajian ini membuktikan bahwa Indonesia sudah benar-benar fokus dalam membantu Palestina dengan tidak fokus bahwa konflik Palestina adalah konflik kemanusiaan dan dapat dijadikan contoh teladan bagi negar-negara Islam lainnya dalam mendukung Palestina agar dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.*

**Kata Kunci :** Kebijakan Luar Negeri; Kemerdekaan; Perjuangan; Diplomasi

## PENDAHULUAN

Sejarah sudah mencatat bahwa Indonesia dan Palestina mempunyai hubungan yang sudah sangat erat dan akrab sejak Indonesia berupaya meminta dukungan internasional agar mengakui kemerdekaan Indonesia utamanya Timur Tengah dan diantaranya terdapat wilayah.

Indonesia sangat tegas dan menolak kolonialisme, imperialisme Israel terhadap Palestina. Lebih dari itu Indonesia juga membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina yang dijajah, ditindas oleh Israel dan memberikan dukungan penuh kepada perjuangan rakyat Palestina agar bisa merdeka seperti negara lainnya di muka bumi ini<sup>1</sup>.

Meskipun begitu pada saat reformasi di Indonesia dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden berupaya keras untuk merajut dan memperbaiki hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel<sup>2</sup>.

Diantara para pemimpin Palestina yang sudah pernah berkunjung ke Indonesia yang mana keberadaannya sangat fenomenal sekaligus Pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat. Pada tahun 1984 menemui Presiden Suharto, pada September 1992 hadir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 di Jakarta, pada tahun 1993 dan pada bulan Agustus 2000 untuk menemui Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta dan itu menjadi sejarah besar bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Pada 21-23 Oktober 2007, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya ke Indonesia. Dalam kunjungannya Presiden Abbas telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Perjanjian kerjasama termasuk di bidang komunikasi dan pendidikan. Abbas kembali mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 2010 dan Februari 2014.

---

<sup>1</sup> Fardah (28 December 2012). "Indonesia remains committed to supporting Palestinian statehood". *Antara News*

<sup>2</sup> Rubenstein, Colin (1 March 2005). "Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting". *Jerusalem Center for Public Affairs*.

<sup>3</sup> "Arafat rethink on statehood". *BBC News*. 16 August 2000

Selain mengutuk,<sup>4</sup> tindakan kejahatan Israel Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya dengan mengundang semua pihak untuk membantu menghentikan serangan Israel ke Palestina dan meminta Dewan Keamanan PBB agar membuat pertemuan formal dan mengeluarkan resolusi untuk memaksa Israel menghentikan dan menentang serangan keji maupun agresi yang mereka lakukan. Karena tindak jahat itu memperburuk penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat hingga saat ini.

Dari peristiwa yang terbaru akhir tahun 2017 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Dalam pidatonya di *Diplomatic Reception Room*, Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini pun menambah daftar panjang penderitaan Palestina pada akhirnya.

Pada Kamis 7 Desember 2017 di Istana Bogor Presiden Indonesia Joko Widodo pun mengecam keras sikap Trump tersebut dan meminta Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali keputusan sepihak tersebut meski tidak digubris sama sekali oleh Trump.

Permasalahan Yerusalem tak terpisahkan dengan kemerdekaan Palestina. Republik Indonesia juga telah bersikap sesuai dengan UUD 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan.

Tak hanya tertera dalam UUD 1945, sikap tegas RI juga acap disampaikan Presiden Jokowi. Yang mana dapat dilihat dari berbagai aspek.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> "Presiden: Indonesia Siap Bertindak Aktif untuk Kemerdekaan Palestina". Jakarta. Republika. Juni 2, 2010.

<sup>5</sup> "Joko 'Jokowi' Widodo Criticized Gaza Attack". *Global Indonesian Voices*.

Dalam konferensi pers di Istana Bogor, Kamis 7/12/2017. Jokowi menegaskan sikap Indonesia dalam isu Palestina. Ia mengatakan, posisi Indonesia tidak pernah berubah. "Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten dengan rakyat Palestina memperjuangkan haknya," ini adalah respons Indonesia atas putusan Presiden Trump yang menyatakan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak dan Jokowi meminta lembaga internasional mengambil tindakan tegas.

Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi kerap memberikan dukungan pada Palestina. Bahkan, dalam janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2014, ia menegaskan akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Selain dalam bentuk pembahasan dengan berbagai forum, Indonesia juga turut memberikan bantuan secara konkret melalui bantuan lapangan berupa bantuan *underground* seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan bantuan lainnya.

Makalah ini merujuk kepada teori yang diajarkan oleh Graham T Alisson dalam buku *Contending Theories of International Relations* yang disusun oleh James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr yang di publish oleh an imprint of Addison Wesley Longman Inc Newyork pada halaman 465 untuk menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan *rational policy model*. Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Graham T. Allison mendeskripsikan 3 model dalam pengambilan keputusan politik luar negeri:

Model 1: Aktor Rasional Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogikan sebagai dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh

pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam model ini para pembuat keputusan itu sangat rasional dan umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan secara rasional, kelemahannya asumsi ini mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokratnya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi. Allison sadar akan kelemahan itu sehingga beliau mengajukan model lainnya, yaitu model “proses organisasi” dan “politik birokratik”.<sup>6</sup>

Model II : Proses organisasi dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanik, keputusan merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu (*standard operating procedure*).

Organisasi ini pada dasarnya bersifat konservatif dan jarang yang mau mencoba sesuatu yang baru, umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil. Salah satu cara untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian masalah yang ada adalah melakukan tindakan seperti sebelumnya, organisasi cenderung memiliki pedoman, buku petunjuk yang berisi bagaimana caranya organisasi mengatasi masalah, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi sebelumnya.

Model III : Politik-Birokratik dalam model ini Politik Luar Negeri ( PLN ) dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. PLN adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai

---

<sup>6</sup> James E Dougherty, Robert I pfaltzgraff jr Contending theories of International Relations fourt edition longman inc newyork h. 489

aktor dan organisasi, *bargaining game* antar bangsa, dengan kata lain pembuatan keputusan PLN adalah proses sosial, bukan intelektual. Jadi dalam Model III ini digambarkan suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional, setiap aktor negara berusaha menetapkan tujuannya, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan secara intelektual, tidak ada pemain yang bisa memperoleh apa yang diinginkan dalam *bargaining* ini.

Lain halnya menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Oleh karenanya, untuk menganalisis bagaimanakah pertautan antara kedua faktor politik ini, dapat digunakan teori *linkage* yang dikemukakan James N. Rosenau (1980). Di samping faktor politik domestik dan eksternal internasional tersebut, menurut Rosenau, terdapat pula variabel individu *decision-maker* seperti kepala negara pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya. Variabel individu ini biasanya terlihat pada gaya kepemimpinan yang khas dari *decision-maker* tersebut yang umumnya sangat bersifat personal. Menganalisis politik luar negeri merupakan suatu usaha untuk menyelidiki suatu fenomena kompleks dan luas yang kurang lebih melibatkan kehidupan internal (aspirasi, atribut, budaya, konflik, kapabilitas, institusi dan rutinitas) dan eksternal dari sekelompok masyarakat yang berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh dan menjaga identitas sosial, hukum dan geografis, sebagai sebuah bangsa.

Apabila analisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri. Di negaranya masing-masing.

Dari yang telah dirumuskan di atas, pokok permasalahan pada tulisan ini yaitu: langkah apa saja yang diambil Pemerintah Indonesia dalam upaya mendukung Palestina agar bisa bebas merdeka dan menjadi Negara yang berdaulat layaknya Negara lain?

Pentingnya penelitian ini dalam kacamata Politik Internasional dan diplomasi terletak pada isu-isu yang dapat menjadikan Palestina sebagai negara berdaulat. Dan sangat erat kaitannya *conventional issues* dimana negara telah bergerak lebih cepat, strategis, dan formatif guna meningkatkan derajat Palestina menjadi Negara yang sebenar-benarnya merdeka dari cengkraman zionis Yahudi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting dengan mengumpulkan data yang spesifik dari berbagai macam referensi yang di dapat lalu dengan demikian dianalisa oleh peneliti (Creswell 2016; 4-5).

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Damai Indonesia**

Dalam berbagai kesempatan Menlu Retno selalu menyampaikan bahwa perjuangan Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan napas diplomasi Indonesia di situ selalu ada Palestina, oleh karena itu diplomasi Indonesia atau upaya Indonesia tidak pernah berhenti untuk membantu Palestina.

Konsulat kehormatan Republik Indonesia di Ramalah merupakan langkah pertama untuk mendekati diri dengan rakyat Palestina. Pada 2016 Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI ke 15 mengenai Palestina dan Al Quds Al Syarif. Sebelumnya pada tahun 2015

Indonesia menjadi tuan rumah *International Conference on the question of Jerusalem*. Indonesia aktif dalam *Peace Conference* yang diinisiasi oleh Perancis. Indonesia juga menjadi pihak yang mendorong pertemuan tingkat menteri OKI pasca kerusuhan yang terjadi di Yerusalem. KTM-OKI dilangsungkan di Istambul pada Agustus 2017.

Indonesia juga memperkuat *capacity building* bagi rakyat Palestina, sejauh ini Indonesia telah memberikan pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina yang mencakup beberapa program unggulan dan ini tidak akan menyurutkan diplomasi Indonesia untuk membela Palestina.

Indonesia telah menampung 1.806 imigran dan mengirimkan bantuan kemanusiaan serta membangun sekolah-sekolah. Selain itu, Indonesia juga memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina dengan membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, dan terus mendorong ASEAN dan PBB mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPD dan DPR. Diplomasi Indonesia bergerak membela rakyat Palestina, antara lain dengan mengusulkan proteksi internasional di Kompleks Al-Aqsa.

### **Upaya Serius Indonesia Memperjuangkan Palestina sebagai Negara Berdaulat**

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan terkait sikap Indonesia yang mengecam pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini tidak dapat diterima. Pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras. Presiden Jokowi mengajak seluruh negara OKI dapat bersatu dan mengenyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina. Isu Palestina harus merekatkan Indonesia dan dunia internasional kembali dengan keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak saja melukai hati umat Islam, namun juga melukai rasa keadilan umat manusia.

Presiden Jokowi juga menyampaikan enam poin penting usulan sikap negara anggota OKI. "Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. *Two-state solution* adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya. Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik bahkan termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI. "Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, Presiden berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak akan surut, bahkan akan meningkat. Indonesia akan menyertai Palestina dalam perjuangannya. Menurut Presiden, dukungan tersebut bukan hanya dalam bentuk dukungan politik, namun juga dalam peningkatan kapasitas dan dukungan kepada perekonomian Palestina.

Presiden juga menegaskan posisi Palestina yang berada di jantung politik luar negeri Indonesia. "Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, disitu terdapat keberpihakan terhadap Palestina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan negara yang berbatasan dengan Palestina, yakni Yordania. Dalam pertemuan selama dua jam dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Ayman Safadi di Amman, Yordania,

kedua Menlu tersebut sepakat berkoordinasi dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina.

Seperti disampaikan dalam keterangan yang dilansir di akun resmi Kementerian Luar Negeri RI, Menlu Retno LP Marsudi menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah untuk mendukung perjuangan Palestina dengan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibukota dari negara Palestina.

Dengan semangat itu pula Presiden Jokowi meminta negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar menindaklanjuti hasil KTT Luar Biasa yang sudah dilakukan. Dua poin penting yang tertuang dalam resolusi itu yakni mengakui Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina dan menolak pengakuan sepihak Trump.

### **Bantuan Kongkret Indonesia**

Indonesia kembali teguhkan komitmen untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina, melalui pemberian *capacity building*. Pemerintah Indonesia memberikan komitmen bantuan senilai US\$ 2 Juta atau setara dengan Rp 28,5 miliar untuk program *capacity building*, sesuai dengan kebutuhan rakyat Palestina, antara lain pertanian, kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, tata pemerintahan dan pendidikan.

Dikutip dari laman *Kemlu.go.id*, Minggu (1/7/2018), komitmen Indonesia tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam pertemuan *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) III* di Bangkok, Thailand, 27 Juni 2018.

Bantuan US\$ 2 Juta tersebut akan disalurkan baik dalam kerangka *Three-year Work Plan (2019-2021) CEAPAD*, yang merupakan salah satu hasil pertemuan CEAPAD III ataupun modalitas lainnya.

Selain bertemu dengan Menlu Palestina, Menlu RI juga bertemu dengan *Commissioner General United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)*, Pierre Krähenbühl.

Menlu Retno dan Commissioner General membahas mengenai langkah dan rencana ke depan UNRWA sehubungan krisis finansial yang dihadapi. Indonesia menghargai peran UNRWA untuk pengungsi Palestina yang berjumlah lebih dari 5.3 juta. Menlu Retno menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu UNRWA

Komisaris Jenderal UNRWA sangat menghargai peran dan kontribusi yang terus diberikan Indonesia untuk Palestina. CEAPAD adalah forum yang dibentuk sejak tahun 2013 sebagai wadah bagi negara-negara Asia Timur untuk membantu peningkatan kapasitas Palestina. Indonesia telah menjadi tuan rumah CEAPAD II di Jakarta, tahun 2014 dan tuan rumah dan ketua pertemuan CEAPAD tingkat pejabat tinggi di Jakarta tanggal 31 Mei 2018 sebagai persiapan pertemuan CEAPAD III.

### **Dukungan Indonesia**

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, sikap Indonesia yang menolak penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak akan berubah. Indonesia tetap konsisten sejak dulu dalam mendukung kepentingan rakyat Palestina.

Kendati ancaman Amerika Serikat untuk mencabut bantuan keuangan itu bisa berdampak bagi Indonesia, diperkirakan pemerintah Indonesia sudah memikirkan alternatif jalan keluarnya yaitu mencari bantuan dari negara lain, kata pengamat. Lebih lanjut, Johan mengatakan sikap Indonesia tergambar jelas dari kebijakan yang ditempuh Presiden Joko Widodo yang sejak awal menolak klaim sepihak AS yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan Indonesia mengajak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk juga mempunyai persepsi yang sama terkait Palestina,

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, mengancam memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump merasa bahwa Negara-negara pendukung resolusi mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita

Di tempat terpisah, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan 'siapa yang menentang melawan kita' pada pemungutan suara. Haley memperingatkan dalam sebuah surat ke belasan anggota PBB agar mereka tahu bahwa 'presiden dan Amerika Serikat melihat pemungutan suara sebagai hal pribadi'. Trump sebagai Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami. Kami akan mencatat masing-masing semua suara dalam masalah ini," tulisnya, seperti dilaporkan wartawan yang sudah melihat surat itu.

Banyak pilihan rasional jika AS benar-benar mencabut bantuan keuangan, termasuk bagi Indonesia, untuk bisa melakukan alternatif dari negara lain, seperti Rusia, Cina atau Turki." Sikap Indonesia tidak akan berubah dalam melihat persoalan di Palestina, karena sikap serupa juga ditunjukkan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan sebagian besar negara-negara Eropa Barat yang selama ini menjadi mitra dekat AS.

Dalam situs resminya, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)-yang menjadi penanggungjawab kerjasama bantuan hibah AS- menyatakan Indonesia merupakan "mitra penting" bagi AS. Disebutkan, prioritas bantuan hibah AS kepada Indonesia difokuskan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang demokratis, pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin, prioritas pembangunan global, hingga pencapaian kerjasama sains.

## **PENUTUP**

Indonesia sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina, semua presiden Indonesia sampai Presiden Jokowi secara terbuka juga tetap menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Bahkan ketika dulu Gaza di gempur Israel dengan bom-bom canggih, kondisi Gaza menjadi porak poranda, banyak korban mati dan luka-luka serta di penjara Israel, dan

ketika dunia Arab masih sibuk urusannya sendiri, masyarakat Indonesia mendirikan Rumah Sakit di Gaza

Dalam kasus pasca keputusan Donald Trump ini, sebenarnya peran Indonesia bisa dilakukan dengan maksimal, menggalang solidaritas negara-negara Timur Tengah (menyadarkankan mereka akan pentingnya masalah Palestina ini), dan harus bersuara lantang menentang keputusan AS ini. Selama ini memang Indonesia politik luar negerinya menghindari cara-cara *Megaphone Diplomacy* atau tidak mau bersuara keras memperjuangkan sikapnya.

Mengingat pentingnya persoalan Yerusalem ini untuk perdamaian dunia, sudah saatnya Indonesia tidak lagi melakukan diplomasi dengan a *Silent Mode-Megaphone Diplomacy* karena Indonesia memiliki posisi strategis, dekat dengan semua negara di Timur Tengah, Eropa dan Amerika Serikat. Politik Bebas Aktif Indonesia harus dijalankan dengan seksama terukur dan agresif-bukan dengan cara diam-diam, karena memang sudah dimatangkan di UUD 45.

Karena itu contoh Indonesia seperti itu perlu di *share* ke negara-negara Timur Tengah untuk mengenyampingkan kepentingan politik wilayahnya masing-masing dengan menghilangkan sekat-sekat sektarian termasuk soal syiah, sunni, alawiy, Islam, Kristen dan sebagainya dalam menghadapi *Common Issue* yaitu masalah perdamaian Palestina.

Indonesia perlu menunjukkan dirinya pada dunia, bahwa Indonesia dengan posisinya yang strategis itu memiliki kepedulian terhadap bangsa-bangsa dunia yang tertindas dari segala bentuk penjajahan di muka bumi. Indonesia harus menunjukkan pada dunia bahwa Undang Undang Dasar 45-nya sudah mengamanatkan agar Indonesia ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Hal- hal di atas merupakan strategi yang dilakukan Indonesia dalam menjadikan Palestina untuk menjadi Negara berdaulat. Tentu hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia perlu bersiap dalam segala hal

baik dalam internal maupun eksternal Indonesia dan itu harus segera diupayakan dengan mengencangkan diplomasinya untuk Palestina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dougherty, James E, Robert I pfaltzgraff jr Contending theories of International Relations fourt edition longman inc newyork
- Rubenstein, Colin. 2005. "Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting". Jerusalem Center for Public Affairs
- BBC News. 16 August 2000
- Global Indonesian Voices.
- Harian Nasional Republika. Juni 2010
- The Jakarta Post (Jakarta). 28 February 2014.
- <https://www.rappler.com/indonesia/berita/191695-alasan-indonesia-perjuangkan-kemerdekaan-palestina>
- <https://www.liputan6.com/news/read/3187861/4-ketegasan-jokowi-dukung-kemerdekaan-palestina>
- <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Marsudi,-Capaian-Tiga-Tahun-Politik-Luar-Negeri--Indonesia-Dalam-Pemerintahan--Jokowi-JK.aspx>
- <https://www.liputan6.com/global/read/3574749/indonesia-beri-bantuan-rp-285-miliar-untuk-program-penguatan-kapasitas-di-palestina>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42437455>
- <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Presiden-Jokowi--Palestina-Selalu-Ada-dalam-Helaan-Napas-Diplomasi-Indonesia.aspx>
- <https://www.dw.com/id/jokowi-negara-negara-muslim-harus-bersatu-membela-palestina/a-41778053>